

# **Kebakaran Plumpang, Syarief Hasan Minta Evaluasi Menyeluruh Keamanan Energi**

INFO NASIONAL -- Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat, 3 Maret 2023 lalu, yang telah merenggut korban jiwa dan harta benda. Musibah ini tentu menjadi tragedi yang sangat memilukan dan perlu menjadi atensi bersama dalam pengelolaan keamanan energi (energy security) di Indonesia. Menurutnya, tempat penyimpanan (Depo) BBM adalah instalasi strategis dan berbahaya yang perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Karena itu, fakta bahwa jarak antara Depo dengan pemukiman penduduk yang sangat sempit perlu dievaluasi secara menyeluruh. Hal itu akan menjadi pilihan kebijakan yang harus diambil dengan cermat dan penuh pertanggung jawaban. "Kita menyampaikan duka mendalam atas tragedi ini. Semoga ini adalah kejadian memilukan terakhir. Sehingga diperlukan adanya langkah kebijakan yang berani agar kejadian serupa tidak terulang. Kita pahami bersama bahwa jarak Depo dengan pemukiman berimplikasi pada potensi terjadinya musibah berbahaya," kata Politisi Senior Partai Demokrat ini. Menurut Syarief, selain penanganan dan bantuan bagi para korban, yang juga sangat penting adalah apa langkah mitigasinya kedepan. Saling menyalahkan tentu bukanlah sikap yang bijak menyikapi musibah ini," ujarnya. Menurutnya, pilihan kebijakan memang hanya ada dua, yakni apakah Depo yang dipindah, atau penduduk yang direlokasi. Kedua pilihan ini tentu akan menyisakan implikasi-implikasi lanjutan. Jika pilihan Depo yang dipindah, Syarief melanjutkan, ini akan berdampak pada kelancaran penyediaan dan distribusi BBM. Apalagi Depo Plumpang ini memasok 20 persen kebutuhan BBM harian nasional, atau 25 persen dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Selain itu, perlu waktu yang cukup lama agar lokasi Depo baru nantinya dapat beroperasi. "Belum juga kita dihadapkan pada kerumitan skema investasi, pembebasan lahan, dan perizinan bagi lokasi Depo yang baru," kata dia. Di sisi lain, jika pilihan relokasi penduduk yang akan dipilih, maka ini harus dipastikan koordinasi dan proses pemindahannya berjalan dengan baik dan tanpa pemaksaan. Perlu kesepahaman bersama bahwa lokasi dekat Depo memang sangat

rawan kecelakaan dan berbahaya. Hak-hak penduduk juga harus dipenuhi, ganti kerugian yang sewajarnya, serta lokasi relokasi yang berkeadilan bagi penduduk. "Jangan sampai ada stigma atas lahan yang selama ini ditempati oleh penduduk, semua perlu dibicarakan dengan baik-baik," ujarnya. Syarif menjelaskan, pembangunan sektor energi adalah hal sama juga pentingnya dengan keberpihakan pada rakyat. "Kita mesti fokus mencari solusi yang terbaik". Karena itu, Syarif melanjutkan, dari dua pilihan kebijakan yang sangat mungkin untuk diambil, harus dipastikan pilihan mana yang memiliki resiko terkecil. Resiko ini dilihat dari banyak perspektif yakni keselamatan penduduk, keamanan energi, maupun keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, untuk instalasi strategis dan berbahaya harus sadanya zona pembatas (buffer zone). Tragedi Depo Plumpang ini pun menjadi pembelajaran bagi instalasi serupa di wilayah lainnya, juga untuk BUMN-BUMN lainnya. "Saya berharap kejadian ini tidak kembali berulang, sekaligus jadi momentum menata keamanan energi untuk sektor-sektor lainnya," kata Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini. (\*)